



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN MUARA WIS

2023

Jl. Patin RT. 08 Muara Wis
email: kec.muarawis@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Muara Wis. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Muara Wis. Semoga LKjIP Kecamatan Muara Wis ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Muara Wis, 28 Maret 2024

Camat Muara Wis

FADHLI ANNUR, S.Pd

NIP. 19710605 199603 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2023		%
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100,00
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	5,5	-7,19	-130,73
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100,00
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	60-70	61,8	100,00
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi ePantau	Persen	100	100	100,00
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100,00
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100,00
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	99,9	99,9
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	95,14	95,14
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100,00
12	Melaksanakan revaluasi awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Revaluasi Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	2	50,00
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100,00
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,40	0,40	100,00
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,5	100,00
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	1	100,00
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	30	66,67
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100,00
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100,00



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	5
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	6
	E. Sumber Daya Aparatur	7
	F. Sumber Daya Keuangan	8
	G. Isu-Isu Strategis	8
	H. Sistematika Laporan Kinerja	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	10
	A. Perencanaan Kinerja	10
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	10
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	12
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
	B. Perjanjian Kinerja	15
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2023	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
	A. Pengukuran Kinerja	19
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	23
	1 Analisis Kinerja Sasaran 1	23
	2 Analisis Kinerja Sasaran 2	25
	3 Analisis Kinerja Sasaran 3	25
	4 Analisis Kinerja Sasaran 4	26
	5 Analisis Kinerja Sasaran 5	26



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

6	Analisis Kinerja Sasaran 6	27
7	Analisis Kinerja Sasaran 7	28
8	Analisis Kinerja Sasaran 8	29
9	Analisis Kinerja Sasaran 9	29
10	Analisis Kinerja Sasaran 10	29
11	Analisis Kinerja Sasaran 11	30
12	Analisis Kinerja Sasaran 12	31
13	Analisis Kinerja Sasaran 13	31
14	Analisis Kinerja Sasaran 14	31
15	Analisis Kinerja Sasaran 15	32
16	Analisis Kinerja Sasaran 16	33
17	Analisis Kinerja Sasaran 17	33
18	Analisis Kinerja Sasaran 18	33
19	Analisis Kinerja Sasaran 19	34
20	Analisis Kinerja Sasaran 20	34
C.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	35
D.	Realisasi Anggaran	35
BAB IV	PENUTUP	39
LAMPIRAN		Xii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Muara Wis dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Wis Tahun 2023; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Muara Wis Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi



pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Wis
2. Mendorong Kecamatan Muara Wis di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Wis untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Muara Wis di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

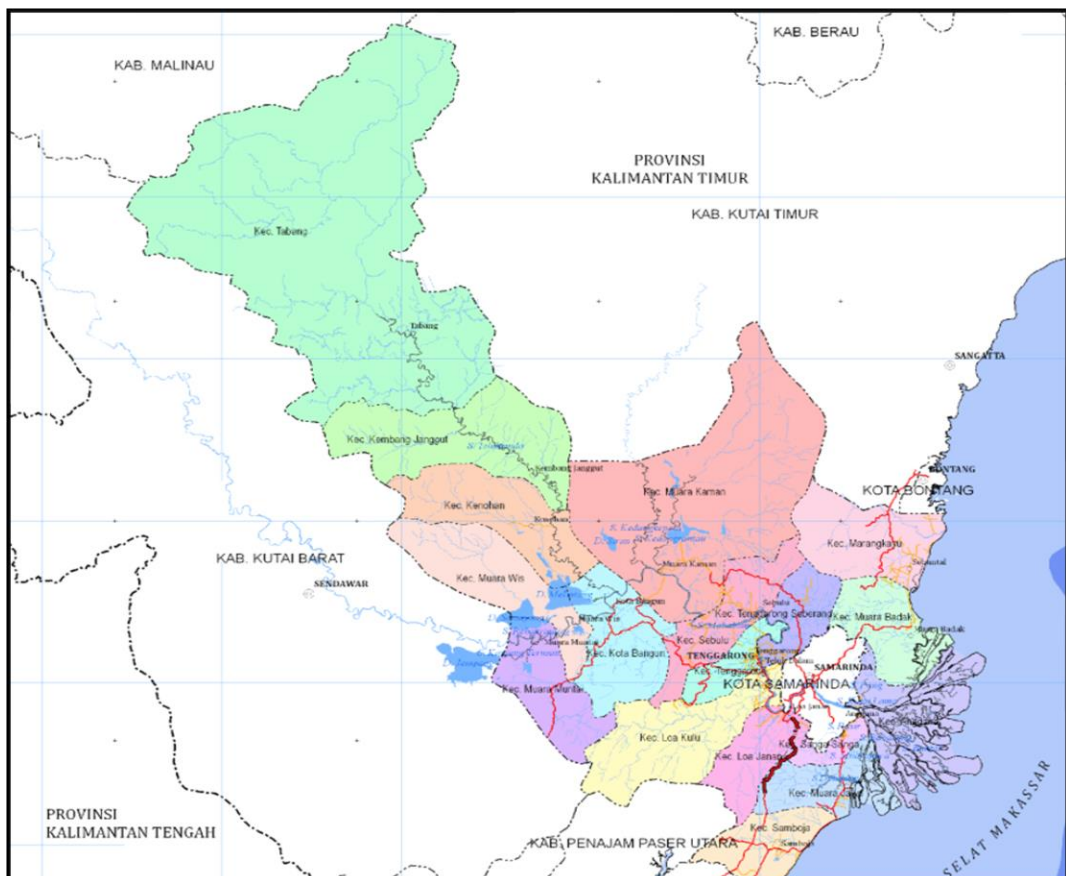
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan



muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kecamatan Muara Wis masuk dalam zona Hulu yang terletak diantara terletak antara 115°58' BT–116°31' BT dan 0°00' LU–0°29' LS dengan luas wilayah mencapai 1.108,16 km². Kecamatan Muara Wis secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara: Kecamatan Kenohan, Sebelah Timur: Kecamatan Kota Bangun, Sebelah Selatan: Kecamatan Muara Muntai, Sebelah Barat: Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat.

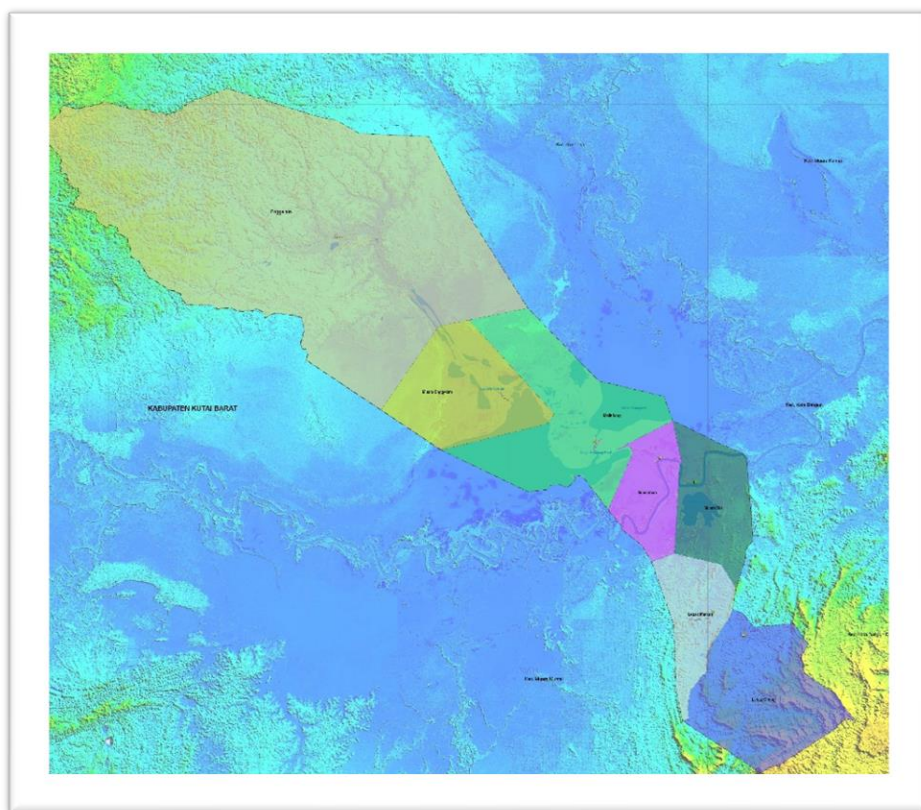
Luas Kecamatan Muara Wis 1.108,16 Km². Secara administratif Kecamatan Kecamatan Muara Wis terdiri atas 7 desa, yaitu Desa Muara Wis, Desa Sebemban, Desa Lebak Mantan, Desa Lebak Cilong, Desa Melintang, Desa Muara Enggelam dan Desa Enggelam. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Muara Wis. Dari desa tersebut, Desa Enggelam merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan, yaitu 32 kilometer, sedangkan Desa Sebemban merupakan desa yang letaknya paling dekat dari





ibukota kecamatan, yaitu 4 kilometer. Pada umumnya, semua desa yang ada di Kecamatan Muara Wis dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat maupun melalui jalan sungai dengan menggunakan perahu atau perahu motor.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Muara Wis



Dengan luas wilayah desa di kecamatan Muara Wis sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Wis

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	Luas (km2)
1	Muara Wis	95,07
2	Sebemban	244,61
3	Lebak Mantan	364,43
4	Lebak Cilog	178,26
5	Melintang	164,88
6	Muara Enggelam	106,84
7	Enggelam	710,55
JUMLAH		1864,64

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Wis



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Muara Wis pada tahun 2023 mencapai 10.104 jiwa. Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Muara Wis per desa adalah:

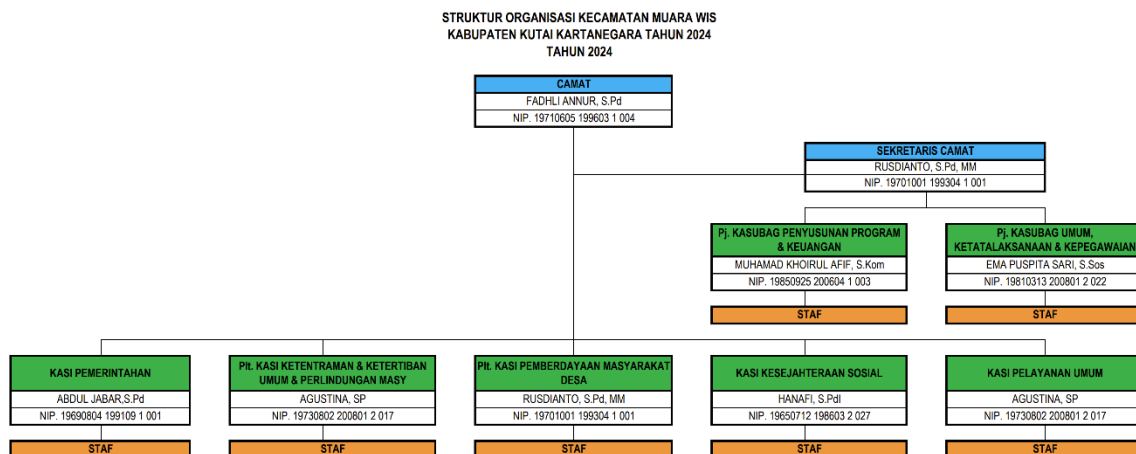
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Wis Semester II Tahun 2023

NO.	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Muara Wis	1.011	1.004	2.015
2	Sebemban	553	472	1.025
3	Lebak Mantan	765	764	1.529
4	Lebak Cilong	1.019	922	1.941
5	Melintang	971	833	1.804
6	Muara Enggelam	400	354	754
7	Enggelam	577	459	1.036
JUMLAH		5.296	4.808	10.104

Sumber Data: SIAK Kecamatan Muara Wis

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Struktur organisasi Kecamatan Muara Wis diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati



melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;



8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2023 sebanyak 31 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.4. PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	0	0	0	0,00%
2	SLTP	0	0	0	0,00%
3	SLTA	17	7	24	77,42%
5	D-I	0	0	0	0,00%
6	D-II	0	0	0	0,00%
7	D-III	0	0	0	0,00%
8	D-IV	0	0	0	0,00%
9	S1	4	2	6	19,35%
10	S2	1	0	1	3,23%
11	S3	0	0	0	0,00%
Jumlah		22	9	31	100%

- b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.5. PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	0	0	0	0,00%
2	II	16	6	22	70,97%
3	III	4	3	7	22,58%
4	IV	2	0	2	6,45%
Jumlah		22	9	31	100%

- c. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.6. PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	1	0	1	14,29%
4	III.b	1	0	1	14,29%
5	IV.a	2	1	3	42,86%
6	IV.b	1	1	2	28,57%
Jumlah		5	2	7	100%



F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Wis pada Tahun 2023 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Muara Wis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.348.919.331,00 yang diperuntukkan untuk belanja operasional serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Muara Wis dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Muara Wis pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Muara Wis. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.



- Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Muara Wis adalah sebagai berikut :

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan Muara Wis dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Muara Wis yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Muara Wis telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Kecamatan Muara Wis mengampu **Misi pertama** yang terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI (RPJMD)	:	“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”	
MISI 1	:	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	
Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP
	2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi
	3.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Muara Wis berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- c. Meningkatnya Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Wis dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Wis adalah meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

2. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Wis, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan			Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	81	82	83	84	85	85
		1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
				2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100
				3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (Khusus Kecamatan yang memiliki Desa)	Persen	5	5,5	6	6,5	7	7

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Wis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan



				3. Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan
			3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2. 4. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	5,5
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan	Tingkat Kepatuhan serta	Persen	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

	atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023		
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan revid awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Revid Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,40
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

C. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun Anggaran 2023, Kecamatan Muara Wis melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.14.985.883.401,00. Dan melalui mekanisme



perubahan APBD Tahun 2023 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar Rp.32.148.919.331,00

Tabel 2. 6. Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 14.985.883.401	Rp. 32.148.919.331	Rp. 17.163.035.930

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 14.985.883.401	Rp. 32.148.919.331	Rp. 17.163.035.930

- Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Kecamatan Muara Wis mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.8 berikut ini :
- Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 merencanakan 6 (Enam) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2. 8. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	APBD	APBDP	Selisih
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.922.069.401	12.190.449.331	4.268.379.930
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000	140.000.000	5.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	55.000.000	25.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.035.243.295	3.774.609.225	(260.634.070)
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.939.723.295	3.676.089.225	(263.634.070)
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	-
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80.520.000	83.520.000	3.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.800.000	60.800.000	(10.000.000)
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.800.000	40.800.000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.000.000	230.000.000	50.000.000
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20.000.000	20.000.000	-
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	100.000.000	50.000.000
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	-
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	30.000.000	-
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	30.000.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	624.698.146	694.698.146	70.000.000
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	-
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.718.146	32.718.146	-
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	-
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	75.000.000	30.000.000
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	-
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000	8.600.000	-
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.880.000	87.880.000	40.000.000
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	375.000.000	-
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	50.000.000	-
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	30.000.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.840.000.000	5.856.514.000	4.016.514.000
28	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	900.000.000	900.000.000
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	830.000.000	650.000.000
30	Pengadaan Mebel	150.000.000	300.000.000	150.000.000
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	650.000.000	450.000.000
32	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.310.000.000	3.176.514.000	1.866.514.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.327.960	563.827.960	7.500.000
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.400.000	299.400.000	-
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.927.960	259.427.960	7.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.000.000	870.000.000	390.000.000
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

37	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	(10.000.000)
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	-
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	700.000.000	400.000.000
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.343.814.000	18.737.094.000	12.393.280.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.000.000	20.000.000	10.000.000
41	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	20.000.000	10.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.333.814.000	18.717.094.000	12.383.280.000
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30.000.000	1.133.280.000	1.103.280.000
43	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.303.814.000	17.583.814.000	11.280.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	125.000.000	110.420.000	(14.580.000)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	125.000.000	110.420.000	(14.580.000)
44	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50.000.000	35.420.000	(14.580.000)
45	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000	75.000.000	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	-	(10.000.000)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	-	(10.000.000)
46	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	-	(10.000.000)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200.000.000	350.956.000	150.956.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	200.000.000	350.956.000	150.956.000
47	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	180.000.000	330.956.000	150.956.000
48	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000	20.000.000	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	385.000.000	760.000.000	375.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	385.000.000	760.000.000	375.000.000
49	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	85.000.000	285.000.000	200.000.000
50	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	250.000.000	250.000.000	-
51	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	225.000.000	175.000.000
	JUMLAH	14.985.883.401	32.148.919.331	17.163.035.930



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah



pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan



maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Muara Wis atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2023 yang terdiri dari 20 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	5,5	-7,19	-130,73	Kurang Berhasil
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

	(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Maret 2023					
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	60-70	61,8	100,00	Sangat Berhasil
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100,00	Sangat Berhasil
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	99,9	99,90	Sangat Berhasil
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	95,14	95,14	Sangat Berhasil
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100,00	Sangat Berhasil
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100,00	Sangat Berhasil
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	2	50,00	Cukup Berhasil
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,40	0,40	100,00	Sangat Berhasil
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,5	100,00	Sangat Berhasil
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	1	100,00	Sangat Berhasil



18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	30	66,67	Cukup Berhasil
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100,00	Sangat Berhasil
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100,00	Sangat Berhasil

Berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026, pada tahun 2023 Kecamatan Muara Wis memiliki (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2023 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2023, Kecamatan Muara Wis memiliki 20 (dua puluh) sasaran dan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 21 Indikator, atau 87,5%;
- b) Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 0 Indikator, atau 0 %;
- c) Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 8,33 %; dan
- d) Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 4,17 %.

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 69 Tahun 2016, Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan



pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan publik kecamatan, diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

1.1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di kecamatan. Target indikator kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% (**sangat berhasil**).

Faktor pendukung dari capaian ini adalah petugas pelayanan bisa melaksanakan sesuai dengan SOP. Adapun kendala yang masih ada adalah sarana dan prasarana pendukung pelayanan kurang lengkap.

1.2. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Salah satu fungsi utama kecamatan adalah Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Target indikator kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100% (**sangat berhasil**).

Faktor pendukung capaian ini adalah kesadaran Masyarakat dalam ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

1.3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa adalah pendapatan desa yang meliputi: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi



masyarakat, hasil gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Target indikator kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2023 sebesar 5,5% dan terealisasi sebesar -7,19% sehingga capaiannya sebesar -130,73% (**kurang berhasil**). Faktor penghambat capaian tersebut adalah terdapat beberapa desa yang mengalami penurunan PADes, seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 3.2. Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Muara Wis

No	Desa	2022	2023	Naik/ (Turun)
1	Enggelam	12.174.500,00	16.397.000,00	4.222.500,00
2	Muara Wis	4.327.600,00	5.000.000,00	672.400,00
3	Lebak Cilog	6.427.003,00	3.635.000,00	(2.792.003,00)
4	Lebak Mantan	192.999.472,00	169.139.285,00	(23.860.187,00)
5	Melintang	-	-	-
6	Sebemban	-	-	-
7	Muara Enggelam	61.135.000,00	62.975.000,00	1.840.000,00
		277.063.575,00	257.146.285,00	(19.917.290,00)

2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) maupun dari inspektorat daerah harus segera ditindaklanjuti setelah OPD menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut. Target indikator kinerja Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau “**sangat berhasil**”. Pada tahun 2023 di Kecamatan Muara Wis tidak ada Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat yang perlu ditindaklanjuti.

3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah.

Laporan Barang Milik Daerah menjadi salah bentuk pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab pengguna anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator kinerjanya adalah Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik



Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **“sangat berhasil”**. Kecamatan Muara Wis selalu melaksanakan dan melaporkan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah setiap Triwulan pada Tahun 2023 kepada Bidang aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Target indikator kinerja Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **“sangat berhasil”**.

Meskipun capaiannya tinggi akan tetapi masih memiliki beberapa kendala, yang membuat proses pengadaan menjadi lambat. Salah satunya adalah Kecamatan Muara Wis belum mempunyai pegawai yang memiliki kompetensi sebagai pejabat pengadaan, sehingga harus memakai jasa dari OPD lain yang prosesnya memakan waktu agak lama.

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sangat penting, selain untuk deteksi dini pencegahan tindak pidana korupsi, tata kelola yang baik dan bersih juga dibangun di atas dasar integritas, akuntabilitas, serta transparansi. Dari sasaran diatas, Indikator kinerjanya terbagi menjadi dua yaitu:



5.1. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100% atau **“sangat berhasil”**. Berdasarkan hasil monitoring dari 5 pejabat struktural dilingkungan Kecamatan Muara Wis yang wajib lapor, semuanya bisa melaporkan LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2023.

5.2. Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100% atau **“sangat berhasil”**. Berdasarkan hasil rekap data dari Target 28 ASN semuanya mengisi LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2023.

6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Pengelolaan kearsipan adalah proses mengatur, mengelola, dan memelihara arsip agar tetap teratur, mudah diakses, dan aman. Baik di perusahaan, pemerintahan, atau lembaga pendidikan, pengelolaan kearsipan memiliki peran krusial dalam menjaga integritas informasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Tata kelola arsip dibutuhkan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya sebagai sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan yang memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu maupun kolektif.

Target indikator kinerja Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah pada tahun 2023 dengan nilai 60-70 (baik) dan terealisasi sebesar 61,8 (baik) sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **“sangat berhasil”**. Penilaian tersebut berasal dari audit kerarsipan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023. Adapun hasil penilaian dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 3.3. Hasil penilaian audit kearsipan Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan	Kategori
1	Unit Pengelola Seksi Pemerintahan	77	BB (Sangat Baik)
2	Unit Pengelola Seksi pelayanan Umum	73	BB (Sangat Baik)
3	Unit Pengelola Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	72	BB (Sangat Baik)
4	Unit Pengelola Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	80	A (Memuaskan)
5	Unit Pengelola Seksi Kesejahteraan Sosial	78	BB (Sangat Baik)
6	Sekretariat	80	A (Memuaskan)
	Nilai Rata-Rata	77	BB (Sangat Baik)
	Unit Kearsipan	47	C (Kurang)
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	61,8	B (Baik)

Capaian tersebut naik daripada capaian tahun lalu yang mendapatkan nilai 61,14. Walaupun demikian masih perlu ditingkatkan lagi agar predikat untuk tahun depan bisa meningkat yaitu dengan meningkatkan sarana, prasarana dan kualitas SDM dalam pengelolaan kearsipan.

7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah

Data sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan, terbukti dengan data yang berperan sebagai informasi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah, yakni berfungsi sebagai pengarah untuk memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik, diperlukan data yang akurat sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai. Kesalahan penggunaan data justru dapat mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak berguna atau tidak tepat sasaran.



Target indikator kinerja Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau predikat **“sangat berhasil”**.

Pada aplikasi e-Pantau seluruh data yang berjumlah 51 (lima puluh satu) sub kegiatan terisi semua datanya sampai dengan *approve* eselon 3. Dan pada aplikasi Satu Data Kukar semua data yang diperlukan juga sudah terisi.

8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.

Kecamatan Muara Wis pada tahun 2023 membuat inovasi dengan nama “Stop Busu” yaitu Stop Buang Sampah di Sungai. Inovasi tersebut masuk dalam 10 besar inovasi ditingkat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Target indikator kinerja Jumlah Inovasi adalah 1 (satu) inovasi dan terealisasi 1 (satu) inovasi sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau predikat **“sangat berhasil”**.

9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan harus dapat diselesaikan pada tahun tersebut sehingga tidak menimbulkan utang yang harus dibayar pada tahun selanjutnya.

Target indikator kinerja capaian output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target 100% dan terealisasi 100% atau predikat **“sangat berhasil”**. Kecamatan Muara Wis pada tahun 2023 dalam melaksanakan seluruh kegiatan tidak menimbulkan utang.

10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran yang sudah ditetapkan, OPD harus mencari strategi supaya kegiatan dan anggaran tersebut bisa direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan. Dari sasaran diatas terbagi menjadi 2 (dua) Indikator kinerja yaitu:



10.1. Persentase realisasi kegiatan fisik

Target indikator kinerja Persentase realisasi kegiatan fisik adalah 100% dan terealisasi 99,9% sehingga capaian kinerjanya adalah 99,9% atau predikat **“sangat berhasil”**. Capaian realisasi kegiatan fisik tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat satu paket pekerjaan lelang yang tidak terlaksana disebabkan oleh keterlambatan dalam proses perencanaannya.

10.2. Persentase realisasi keuangan

Target indikator kinerja Persentase realisasi keuangan adalah 100% dan terealisasi 95,14% sehingga capaian kinerjanya adalah 95,14% atau predikat **“sangat berhasil”**. Capaian realisasi keuangan yang hanya 95,14% tersebut dikarenakan sisa anggaran gaji dan tunjangan yang besar dan terdapat satu paket pekerjaan lelang tidak terlaksana yang nilainya juga cukup besar.

11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya

Hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah perlu menerapkan manajemen risiko adalah adanya risiko-risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko-risiko ini perlu diidentifikasi, dianalisis dan ditangani agar gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi dapat diminimalkan atau apabila terjadi dampaknya tidak signifikan. Selain itu, dalam penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) parameter Manajemen Risiko Indeks (MRI) termasuk dalam aspek yang dinilai.

Target indikator kinerja Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari adalah 2 laporan dan terealisasi 2 laporan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau **“sangat berhasil”**. Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Kecamatan Muara Wis sudah disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara sebelum tanggal 10 Januari 2024.



12. Melaksanakan Reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan Renstra, RKT, LKjIP dan perencanaan program kerja. Target indikator kinerja Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama adalah 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen sehingga capaian kinerjanya 100% atau **“sangat berhasil”**.

13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK”

BerAKHLAK sebagai Core Values ASN adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Sehingga diperlukan adanya panduan perilaku yang memuat penerapan nilai-nilai BerAKHLAK bagi ASN, khususnya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Panduan Perilaku BerAKHLAK ini bertujuan untuk memberikan arah kepada seluruh ASN dalam berperilaku, memberikan pelayanan, maupun melakukan pekerjaannya sehari-hari. Dengan adanya Panduan Perilaku ini, diharapkan para Aparatur Sipil Negara mampu menanamkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa secara bertanggung jawab dan berintegritas.

Target indikator kinerja Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja adalah 4 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan sehingga capaian kinerjanya 50% atau **“cukup berhasil”**. Sosialisasi dan internalisasi tata kelola Core Values ASN “BerAKHLAK” sudah dilaksanakan, sedangkan penetapan leader dan tim budaya kerja belum dilaksanakan.

14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun

Pengembangan kompetensi ASN diharapkan tidak hanya meningkatkan keahlian personal ASN, melainkan juga dapat mendongkrak performa institusi. Terdapat tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural.



Target indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi ASN adalah 100%, dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100% atau “**sangat berhasil**”. Seluruh ASN di Kecamatan Muara Wis mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa pelatihan maupun sosialisasi baik yang diadakan intern kecamatan maupun yang diadakan oleh instansi/lembaga lain.

Dalam melaksanakan pengembangan kompetensi ASN tersebut Kecamatan Muara Wis bekerjasama dengan BKPSDM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara dan dengan instansi/lembaga lain.

15. Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan

Keluarga dikatakan sehat dapat dilihat dari 12 indikator dibawah ini:



Adapun cara menghitung indeks keluarga sehat adalah:

$$IKS = \frac{\text{Jumlah indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1}}{12 - \text{Jumlah indikator yang tidak ada di keluarga}}$$

Kategorisasi:

- Keluarga Sehat : IKS = >0,800
- Keluarga Pra Sehat : IKS = 0,500 - 0,800
- Keluarga Tidak Sehat : IKS = <0,500

Target indikator kinerja indeks keluarga sehat adalah 0,40 dan terealisasi sebesar 0,4 sehingga capaian kinerjanya 100% atau predikat “**sangat berhasil**”. Data indeks keluarga sehat Kecamatan Muara Wis di dapatkan



melalui koordinasi dengan Puskesmas Kecamatan Muara Wis.

16. Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan

Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Aksi Konvergensi ada 8 (delapan) yakni Aksi analisis situasi, penyusunan rencana kerja kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, rembuk stunting, Peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa, system manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting dan yang terakhir adalah review kinerja.

Target indikator kinerja Penurunan Prevalensi stunting adalah 16,5% dan terealisasi sebesar 16,5% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau predikat **“sangat berhasil”**. Data tersebut di dapatkan dari Puskesmas Kecamatan Muara Wis.

17. Menurunnya Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator sensitif yang menunjukkan kualitas kesehatan suatu Negara, karena AKI menggambarkan hasil interaksi dari berbagai aspek, baik aspek klinis (kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan), aspek sistem layanan kesehatan.

Target indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan adalah 1 (satu) dan terealisasi sebesar 1 (satu) sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% atau predikat **“sangat berhasil”**. Data tersebut di dapatkan dari Puskesmas Kecamatan Muara Wis.

18. Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Perilaku Stop Buang Air Besar (BABS) diikuti dengan pemanfaatan sarana



sanitasi yang saniter berupa jamban sehat.

Target indikator kinerja Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) adalah 40 (empat puluh) dan terealisasi sebesar 30 (tiga puluh) sehingga capaian kerjanya adalah 66,67% atau predikat **“cukup berhasil”**.

19. Meningkatnya Posyandu Aktif

Posyandu Aktif adalah Posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: Ibu hamil, Ibu nifas, bayi, balita, KB, Imunisasi, Gizi, Pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal lebih dari 50%.

Target indikator kinerja Persentase Posyandu Aktif adalah 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kerjanya adalah 100% atau predikat **“sangat berhasil”**.

Dari jumlah posyandu yang ada di desa-desa seluruh Kecamatan Muara Wis, semuanya sudah bisa menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah

Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.

Target indikator kinerja Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran adalah 100% dan terealisasi 100% atau predikat **“sangat berhasil”**. Kecamatan Muara Wis sudah disediakan tempat untuk merokok, dan pada setiap ruangan terdapat peringatan larangan untuk merokok.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:



a) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	23,09	32.148.919.331	30.585.300.587	95,14	Tidak Efisien

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran menunjukkan tidak efisien karena rata-rata capaian kinerja sasaran lebih rendah dibanding realisasi anggaran.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada pada Kecamatan Muara Wis dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95,14% adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.190.449.331	11.060.746.783	90,73
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.000.000	114.258.200	81,61
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000	49.048.800	89,18
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	9.620.000	64,13
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	10.295.000	68,63
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	3.390.000	67,80
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	4.680.000	93,60
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	26.014.400	86,71
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	11.210.000	74,73
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.774.609.225	3.524.722.755	93,38
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.676.089.225	3.432.672.755	93,38
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	8.530.000	56,87
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	83.520.000	83.520.000	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.800.000	57.054.000	93,84
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	16.254.000	81,27
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.800.000	40.800.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000	208.989.500	90,87
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20.000.000	19.189.500	95,95
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	97.430.000	97,43
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	47.700.000	95,40
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	22.330.000	74,43
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	22.340.000	74,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	694.698.146	678.310.200	97,64
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.093.000	94,57
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

		32.718.146	32.578.000	99,57
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.610.000	98,05
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	73.298.000	97,73
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.350.000	91,88
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000	8.000.000	93,02
24	Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.880.000	87.475.000	99,54
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	369.946.000	98,65
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	43.050.000	86,10
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	29.910.200	99,70
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.856.514.000	5.089.927.745	86,91
28	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900.000.000	801.375.779	89,04
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	830.000.000	798.319.779	96,18
30	Pengadaan Mebel	300.000.000	288.756.320	96,25
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	650.000.000	595.376.750	91,60
32	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.176.514.000	2.606.099.117	82,04
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.827.960	545.708.986	96,79
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.400.000	287.337.209	95,97
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.427.960	253.371.777	97,67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.000.000	841.775.397	96,76
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	89.584.000	89,58
37	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	12.062.000	60,31
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000	691.898.617	98,84
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	48.230.780	96,46
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.737.094.000	18.430.948.804	98,37



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000	7.600.000	38,00
41	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	7.600.000	38,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.717.094.000	18.423.348.804	98,43
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.133.280.000	1.050.644.000	92,71
43	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17.583.814.000	17.372.704.804	98,80
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.420.000	94.600.000	85,67
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.420.000	94.600.000	85,67
44	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.420.000	35.420.000	100,00
45	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000	59.180.000	78,91
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	350.956.000	302.090.000	86,08
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	350.956.000	302.090.000	86,08
47	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	330.956.000	290.060.000	87,64
48	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000	12.030.000	60,15
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	760.000.000	696.915.000	91,70
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	760.000.000	696.915.000	91,70
49	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	285.000.000	271.940.000	95,42
50	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	250.000.000	242.640.000	97,06
51	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	225.000.000	182.335.000	81,04
JUMLAH		32.148.919.331	30.585.300.587	95,14



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis tahun 2023 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Muara Wis pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026. Kecamatan Muara Wis telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Tabel 4. 1. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	5,5	-7,19	-130,73	Kurang Berhasil
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Pertanggal 31 Maret 2023 Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	60-70	61,8	100,00	Sangat Berhasil
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100,00	Sangat Berhasil
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	99,9	99,90	Sangat Berhasil
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	95,14	95,14	Sangat Berhasil
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100,00	Sangat Berhasil
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100,00	Sangat Berhasil
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	2	50,00	Cukup Berhasil
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100,00	Sangat Berhasil
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,40	0,40	100,00	Sangat Berhasil
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,5	100,00	Sangat Berhasil
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	1	100,00	Sangat Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Tahun 2023

18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	30	66,67	Cukup Berhasil
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100,00	Sangat Berhasil
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100,00	Sangat Berhasil

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 21 Indikator, atau 87,5%;
- Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 0 Indikator, atau 0 %;
- Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 8,33 %; dan
- Capaian kinerja 0 s/d $< 50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 Indikator, atau 4,17 %.

Tabel 4. 2. Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
BELANJA	32.148.919.331,00	30.585.300.587,00	95,14
BELANJA OPERASI	24.923.758.367,00	24.149.109.183,00	96,89
Belanja Pegawai	3.914.969.225,00	3.668.832.755,00	93,71
Belanja Barang dan Jasa	21.008.789.142,00	20.480.276.428,00	97,48
BELANJA MODAL	7.225.160.964,00	6.436.191.404,00	89,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.256.966.964,00	3.044.381.629,00	93,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.116.554.000,00	2.557.319.726,00	82,06
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	851.640.000,00	834.490.049,00	97,99

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja Kecamatan Muara Wis tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.148.919.331,00 terealisasi sebesar Rp30.585.300.587,00 atau 95,14%. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp24.923.758.367,00 dengan realisasi sebesar



Rp24.149.109.183,00 atau 96,89%. Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2023 Kecamatan Muara Wis mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp7.225.160.964,00 dan telah terealisasi sebesar Rp6.436.191.404,00 atau 89,08%.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi teknis untuk meningkatkan kinerja yang dinilai kurang untuk segera menjadi perhatian khusus;
- 2) Mengevaluasi dan memotivasi kinerja ASN di Lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan agar terjadi peningkatan produktivitas kinerja ASN;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkenaan dengan pelayanan publik di Perangkat Daerah Kecamatan Muara Wis;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada pemerintah desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya

Camat Muara Wis

Fadhli Annur, S.Pd
NIP. 19710605 199603 1 004